GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia **Tgl/Bln/Thn : 28/11/2004**

Subyek : **Hari : Selasa**

Kata Kunci : **Halaman : 28**

KLH Umumkan Peringkat 251 Perusahaan

JAKARTA (Media): Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kemarin mengumumkan tingkat kinerja penaatan 251 perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara terbuka kepada masyarakat. Pengumuman tersebut, menurut Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, untuk mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tingkat kinerja penaatan tersebut merupakan hasil evaluasi dari pengawasan yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui pelaksanaan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) Januari 2003- September 2004.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup, berbeda dengan kegiatan pengawasan yang selama ini dilakukan, sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan maka hasil pengawasan terhadap penaatan perusahaan perlu diketahui masyarakat. Tidak hanya diketahui PPLH dan pihak perusahaan saja. Untuk itu, kata dia, melalui pelaksanaan PROPER, hasil pengawasan tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Jumlah perusahaan peserta PROPER Januari 2003-September 2004 lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan PROPER 2002-2003 yang telah diumumkan pada April 2004. Peserta PROPER Januari 2003-September 2004 berjumlah 251 perusahaan, sedangkan perusahaan PROPER 2002-2003 sebelumnya berjumlah 85 perusahaan. Berkaitan dengan jenis industri, perusahaan peserta PROPER terdiri dari industri manufaktur, prasarana dan jasa; industri pertambangan, energi dan migas; serta industri pertanian dan kehutanan. Sedangkan berdasarkan aspek permodalan perusahaan, peserta PROPER berasal dari perusahaan penanaman modal asing (PMA), perusahaan modal dalam negeri (PMDN), dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada pengumuman PROPER Januari 2003-September 2004 belum ada perusahaan yang mendapatkan peringkat Emas, perusahaan yang berperingkat Hijau baru mencapai sembilan perusahaan, perusahaan berperingkat Biru 114 perusahaan, perusahaan Merah 86 perusahaan, dan perusahaan yang berperingkat Hitam mencapai 42 perusahaan. Menyikapi masih banyaknya perusahaan yang belum taat yaitu masih berperingkat Merah dan Hitam, Rachmat Witoelar menegaskan bahwa kepada perusahaan yang belum taat terutama yang masih berperingkat Hitam untuk serius dalam menangani dampak lingkungannya. "Apabila tidak ada kemajuan yang berarti dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan maka akan segera dilakukan tindakan penegakan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang belum taat. Langkah ini dilakukan demi melindungi rakyat yang selama ini menjadi korban dari pencemaran dan perusakan lingkungan oleh kegiatan perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab."

Menteri Lingkungan Hidup selanjutnya menambahkan bahwa tidak ada tempat lagi bagi perusahaan untuk bermain-main dalam pengelolaan lingkungan. Seluruh rakyat Indonesia berhak atas kualitas lingkungan yang baik dan bersih. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi rakyatnya.

Pada kesempatan ini, Menteri Negara Lingkungan Hidup juga menyatakan penghargaan kepada perusahaan yang berperingkat Hijau atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengelola lingkungan dengan baik.

"Perusahaan yang berperingkat Hijau telah menunjukkan keseriusan mereka dalam mengelola dampak lingkungan. Upaya ini patut dicontoh oleh perusahaan lainnya," ujar Rachmat Witoelar mengharapkan agar perusahaan yang telah berperingkat Hijau untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menjadi perusahaan yang berperingkat Emas dan sekaligus dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lainnya.

Kesembilan perusahaan PROPER berperingkat Hijau adalah PT Unilever Indonesia (Rungkut Surabaya, Jawa Timur), PT Unilever Indonesia (Cikarang, Jawa Barat), PT Indocement Tunggal Perkasa (Citeureup, Jawa Barat), PT Semen Cibinong (Cilacap, Jawa Tengah), PT Lontar Papyrus Sakti (Tanjung Jabung Barat, Jambi), PT Tanjung Enim Lestari (Muara Enim, Sumatera Selatan), PT Smelting (Gresik, Jawa Timur), PT Nippon Shokubai Indonesia (Cilegon, Banten), dan PT. Jawa Power (Probolinggo, Jawa Timur).

Peran aktif masyarakat dan *stakeholder* lainnya sangat dibutuhkan dalam menyikapi peringkat kinerja masing-masing perusahaan. Rachmat Witoelar menegaskan bahwa tanpa peran aktif masyarakat dan *stakeholder* lainnya termasuk media massa, perbankan, pasar modal, dan LSM maka penerapan PROPER sebagai instrumen penaatan tidak akan efektif.

Menindaklanjuti pengumuman ini, diharapkan agar masyarakat dan *stakeholder* dapat memberikan penghargaan terhadap perusahaan yang telah berkinerja baik. Serta memberikan tekanan terhadap perusahaan yang belum taat atau berperingkat buruk. Namun, peran aktif masyarakat dan *stakeholder* tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP